

Memahami Fenomena Populisme di Abad ke-21 *Understanding the Phenomenon of Populism in the 21st Century*

Muhammad Sahlan¹, *Muhammad Yunus Ahmad²

^{1,2}*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh*

*Email: m.yunus@ar-raniry.ac.id

Abstract

This article aims to discuss populism, a term in politics that is increasingly used throughout the world, including in Indonesia. Populism has been used to describe many leaders and situations in different contexts, and scholars have not agreed on a definitive formulation. This article will fill this gap by using a literature review to increase and enrich knowledge about populism and deepen its surrounding discourse, specifically academic discourse in social and political fields. This article contends that although scholars differ in their definition of populism, the political phenomenon can still be identified. Empirically, populism can be identified through behaviors, attitudes, and political rhetoric. Furthermore, the article concludes that increased populism in a global and national context is influenced by various contexts and problems that exist in different countries.

Keywords: *Populism, Populist, Mass, Elite, Public Will*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang populisme, yaitu sebuah term politik yang akhir-akhir ini menguat di dunia, termasuk di Indonesia. Populisme telah digunakan untuk menggambarkan pemimpin dan situasi dalam konteks yang beragam, dan para scholar belum menemukan kata sepakat mengenai formulasi definisi yang tepat tentang populisme. Artikel ini mencoba mendiskusikannya dengan menggunakan pendekatan studi literatur dengan harapan dapat memberikan kontribusi dan pengayaan pengetahuan, memperdalam diskursus dan menambah wacana akademik, khususnya dalam bidang ilmu sosial dan politik. Kajian ini berpendapat bahwa meskipun para ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang populisme, tidak berarti fenomena sosial politik ini tidak dapat diidentifikasi. Pada tingkat empiris, populisme dapat diidentifikasi melalui sikap, perilaku dan retorika politiknya. Artikel ini berkesimpulan bahwa menguatnya populisme di tingkat global dan nasional dipengaruhi oleh faktor yang beragam sesuai dengan konteks dan persoalan yang dihadapi oleh masing-masing negara.

Kata Kunci: *Populisme, Populis, Rakyat, Elite, Kehendak Umum*

A. Pendahuluan

Peristiwa terpilihnya Donald J. Trump sebagai presiden Amerika Serikat ke-45 pada tahun 2016 dan keluarnya Inggris Raya dari keanggotaan negara-negara Uni Eropa pada tahun yang sama merupakan dua peristiwa yang membuat istilah populisme menjadi sangat populer (Corbett 2016; Freedland 2023; Inglehart and Norris 2016; Jonge 2017; Kaletsky 2016). Donald J. Trump, seorang miliuner yang mewarisi perusahaan orang tuanya sekaligus seorang artis yang sering tampil di TV, maju melalui Partai Republik, awalnya sama sekali tidak diprediksikan akan mampu memenangkan kursi Presiden Amerika Serikat yang ke-45. Ia dinilai tidak memiliki pengalaman, kapasitas, dan pengetahuan politik yang cukup. Reputasinya sebagai pengusaha maupun artis juga tidak terlalu baik sehingga para analis politik umumnya tidak memprediksikan kemenangannya (Norris and Inglehart 2019:3). Sementara Hillary Clinton selaku lawan politiknya merupakan istri dari mantan presiden Amerika Serikat ke-42, Bill Clinton. Selain berpengalaman menjadi ibu negara selama dua periode saat suaminya menjabat presiden, Hillary Clinton juga dikenal terdidik dan pernah berpengalaman menjadi menteri luar negeri dalam Kabinet Barack Hussein Obama. Namun pengalaman dan pengetahuan politik Hillary Clinton yang maju melalui Partai Demokrat ternyata tidak menjadi pertimbangan pemilih dalam memilih presiden Amerika Serikat ke-45. Masyarakat Amerika Serikat lebih memilih Donald J. Trump.

Fenomena yang sama juga terjadi di Inggris. Inggris menggelar referendum pada tahun 2016 dalam rangka memilih apakah bertahan atau keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Sebagian pengamat politik memprediksikan masyarakat Inggris akan memilih bertahan dari Uni Eropa. Namun setelah hasil pemungutan suara dihitung, jumlah pemilih yang menghendaki Inggris keluar dari Uni Eropa ternyata lebih besar (51.89%) dibanding yang menginginkan bertahan (48.11%). Dua peristiwa yang hasilnya di luar perkiraan para pengamat politik tersebut kemudian mendorong para scholar untuk mengkaji dan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di balik dua fenomena anomali tersebut. Satu di antara dari beragam argumen yang muncul di balik kemenangan Donald Trump dan *Brexit* adalah populisme (Langlois 2021; Michael Cox 2017; Shuster 2016).

Populisme ternyata tidak hanya muncul dan menjadi *scapegoat* dalam konteks politik Amerika Serikat dan Inggris, melainkan juga terjadi di sejumlah negara lain seperti Brazil, Hongaria, Perancis, Turki, Filipina, bahkan Indonesia. Jair Bolsonaro di Brazil, Viktor Orban di Hongaria, Marine Le Pen di Perancis, Recep Tayyip Erdogan di Turki, Narendra Modi di India, Rodrigo Duterte di Filipina (Wolf 2023:176), Joko Widodo dan Prabowo di Indonesia (Hadiz 2016:179; Mietzner 2020) disebut merupakan politisi yang memanfaatkan strategi, jargon, dan retorika populisme, baik dalam meraih kemenangan maupun dalam mempertahankan kekuasaan.

Begitu pula di Eropa, meningkatnya dukungan suara terhadap partai politik berhaluan kanan (*right-wing party*) seperti Finns Party di Finlandia disebut-sebut dipengaruhi oleh menguatnya populisme (Mudde 2007). Jumlah dukungan suara Finns Party meningkat dari 39 kursi pada pemilihan umum sebelumnya menjadi 46 kursi pada pemilihan umum yang di gelar April 2023. Bertambahnya perolehan kursi Finns Party di parlemen menyebabkan Sanna Marin--media darling surat kabar Barat--tergeser posisinya dari kursi Perdana Menteri Finlandia yang didudukinya sejak 2019 karena partai yang ia pimpin, Partai Sosial Demokrat (berhaluan kiri tengah) kalah atau berada di urutan ke tiga perolehan kursi terbanyak di parlemen. Fenomena yang sama juga terjadi di negara Eropa lain, di mana partai politik populis berhaluan kanan (*right-wing party*) mendapat dukungan suara melimpah dari pemilih karena menggunakan jargon populisme dalam retorika politiknya. Namun, apa sesungguhnya populisme? Pertanyaan ini meskipun sederhana namun masih sangat jarang dieksplorasi secara akademik terutama di Indonesia. Akibatnya, pengetahuan substantif dan epistemologis tentang populisme, seperti bentuk dan sebab-sebab kemunculannya masih sangat terbatas dan sulit diakses. Karena itu, studi ini dilakukan bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik terhadap kajian populisme dengan harapan dapat memperkaya pengetahuan sekaligus memperdalam wacana dan diskursus tentang populisme yang saat ini telah menjadi tren sosial politik global kontemporer.

B. Metode

Artikel ini merupakan kajian literatur tentang populisme. Sejak populisme menjadi fenomena global, para scholar berusaha menjelaskan fenomena tersebut dari berbagai perspektif. Namun seperti disebutkan oleh Paul Taggart (2000:1), semakin banyak penjelasan tentang populisme maka semakin tidak jelas dan membingungkan konsep tersebut. Ghita Ionescu dan Ernest Gellner (1969:1) jauh-jauh hari bahkan menggambarkan populisme seperti sosok hantu, menyeramkan, memiliki banyak rupa namun pada saat yang bersamaan sulit digambarkan seperti apa “hantu” populisme tersebut. Atas dasar itu, kajian tentang populisme dengan pendekatan studi literatur sangat penting dilakukan, terutama untuk menjernihkan konsep dasar dari fenomena yang masih sangat membingungkan tersebut. Dari sana kemudian kajian lanjutan yang lebih dalam dan komprehensif perlu dilakukan. Kajian literatur adalah bagian dari pendekatan kualitatif di mana peneliti atau penulis memiliki ruang artikulasi untuk melakukan analisis dan menarik kesimpulan secara induktif (Holliday 2007:6). Proses tersebut dimulai dengan langkah mengumpulkan data dan literatur tentang populisme, kemudian membaca, melakukan klasifikasi tematik, analisis kritis, dan mendeskripsikan analisis tersebut ke dalam bentuk narasi yang sistematis dan terstruktur sehingga mudah dipahami dan diharapkan menjadi sebuah diskursus baru.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Apa itu populisme?

Populisme adalah sebuah konsep yang dikonstruksi oleh para scholar untuk menjelaskan sebuah fenomena politik dan demokrasi yang terjadi pada abad ke-20 dan menguat kembali pada abad ke-21, terutama di negara-negara Eropa Barat. Karena itu, tidak ada pemimpin atau partai politik yang secara langsung dan terbuka mengaku atau mendeklarasikan dirinya sebagai populis atau populisme (Goodhart 2017:55).

Istilah populisme berasal dari kata Latin, *populus*, yang berarti rakyat (Heywood 2021:169). Sementara dalam bahasa Romawi Kuno, rakyat digambarkan dalam dua kata: *populus* dan *vulgus*. *Populus* bermakna rakyat secara keseluruhan, sementara *vulgus* adalah rakyat kelas rendah (Harpen 2021:3). Namun ketika dihadapkan pada pendefinisian populisme, para ahli memiliki pandangan yang beragam. Cas Mudde (2004:543) salah seorang ilmuwan politik yang dikenal fasih menjelaskan populisme mendefinisikan populisme sebagai:

“a thin-centred ideology that considers society to be ultimately separated into two homogeneous and antagonistic camps, “the pure people” versus “the corrupt elite,” and which argues that politics should be an expression of the general will of people.”

Mudde mengategorikan populisme sebagai ideologi tipis (thin ideology) untuk membedakannya dengan ideologi tebal (thick ideology) seperti liberalisme dan sosialisme. Menurutnya, populisme memiliki kecenderungan menyandarkan diri pada ideologi lain seperti nasionalisme, fundamentalisme, konservatisme, sosialisme. Populisme menurut Mudde belum dapat digolongkan sebagai sebuah ideologi tebal dikarenakan tidak memiliki konsistensi posisi dalam bentuk sikap maupun nilai inti yang diperjuangkan. Akibat posisinya yang fleksibel, pragmatis, dan berubah-ubah, populisme sering dijuluki sebagai bunglon, yaitu semacam binatang yang memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya sesuai lingkungan di mana ia berada, baik untuk mengelabui mangsa maupun untuk memproteksi dirinya dari serangan musuh. Selain itu menurut Mudde, populisme cenderung melihat masyarakat dalam dua kubu yang antagonis dan homogen, yaitu “rakyat yang murni” dan “elite yang korup” dan mereka berargumen bahwa politik seharusnya merupakan ekspresi dari kehendak rakyat, bukan kehendak elite. Mudde memberikan tanda petik pada kata “the pure people” dan “the corrupt elite” dikarenakan dua kata tersebut memiliki makna subjektif hasil dari imajinasi konstruktif para populis yang berusaha memosisikan dan

merepresentasikan dirinya sebagai bagian dari “rakyat yang bermoral” dan berseberangan dengan “para elite yang korup”.

Berbeda dengan Mudde, Weyland (2001:14) memandang populisme sebagai sebuah strategi politik (bukan ideologi) yang dipakai oleh individu-individu pemimpin untuk meraih, menjalankan maupun mempertahankan kekuasaan dengan cara mencari dukungan langsung--tanpa perantara, tanpa institusi--dari para pengikutnya yang kebanyakan mereka itu tidak terorganisir dengan baik (Wiles 1969:167). Sementara Jensen (2011:82) melihat mobilisasi massa yang digerakkan oleh para populis terhadap para pengikutnya merupakan proyek politik berskala besar yang memobilisasi sektor sosial yang termarginalkan ke dalam bentuk aksi politik praktis dan umumnya menggunakan isu-isu kontroversial seperti aborsi, hak terhadap LGBT, dan imigran. Pada saat yang sama, mereka mengartikulasikan retorika anti-elite dan pro-nasionalis dengan mengatasnamakan rakyat.

Populisme sebagai strategi mobilisasi politik juga diajukan oleh Paul D. Kenny. Seperti dikutip oleh Eve Warburton (2019:206), populisme menurut Kenny dipahami sebagai sebuah bentuk mobilisasi yang mana figur politik karismatik mencari koneksi langsung dengan para pemilih untuk meraih kekuasaan dengan cara melangkahi jaringan pemilih partai yang ada. Adapun Wodak (2015:1) memandang populisme sebagai diskursus dan retorika politik yang menempatkan rakyat versus elite, menjadikan perilaku buruk elite, krisis ekonomi, segala bentuk gangguan dan ancaman sebagai materi politik dalam rangka meraih dan mempertahankan kekuasaan. Lebih spesifik lagi Wodak menyebutkan bahwa populisme merupakan permainan bahasa politik yang bertujuan mendapatkan dukungan dengan cara menyebarkan rasa takut di dalam masyarakat sehingga masyarakat membutuhkan sosok penyelamat, yang tentu saja dari kalangan populis. Definisi yang diberikan Wodak kurang lebih sama dengan definisi populisme Norris dan Inglehart (2019:4) yang menekankan pada gaya retorika politik ketimbang ideologi politik.

Dari beberapa definisi di atas terlihat dengan jelas bahwa para scholar paling tidak dalam mengkaji populisme terbelah ke dalam tiga perspektif, yaitu melihat populisme sebagai ideologi, sebagai strategi gerakan, dan sebagai retorika diskursus politik. Perbedaan cara pandangan tersebut menurut Moffit (2020:26) tidak terlepas dari konteks di mana para scholar mengkaji fenomena populisme. Mudde misalnya, ia lebih banyak mengkaji populisme di Eropa dan Amerika dengan mengambil konsentrasi pada kajian partai politik berhaluan kanan. Sebagaimana diketahui, paska Perang Dingin, sejumlah partai politik berhaluan kanan di Eropa yang mengampanyekan anti-imigran, mengusung nilai moral yang berbasis pada gereja, dan mempertahankan tradisi sosial lama semakin banyak mendapat simpati dari para pemilih, terutama mereka yang berasal dari kalangan tua, kurang terdidik, dan mereka yang teralienasi dan menjadi korban dari sistem ekonomi liberal.

Sementara Weyland lebih banyak melakukan kajian di Amerika Latin, negara-negara yang sedang berkembang, dan negara-negara bekas jajahan Eropa atau dalam studi hubungan internasional dikenal dengan istilah *Global South*. Paul D. Kenny melakukan kajian komparatif populisme di Asia. Sementara Wodak dan Norris yang berpandangan bahwa populisme sebagai diskursus dan retorika politik mengkaji populisme secara global tanpa batas wilayah geografi atau batasan politis lainnya. Perbedaan pendekatan konseptual populisme lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Perbandingan pendekatan konseptual populisme

	Ideasional/ideologi	Strategi	Diskursus
Apakah populisme sebagai konsep binari atau gradasional?	Binari	Gradasional	Gradasional
Apakah populisme dilihat sebagai atribut atau praktik?	Atribut	Praktik	Praktik

Scholar utama	Mudde, Rovira Kaltwasser, Hawkins, Canovan, Muleer	Weyland, Roberts, Jansen, Kenny	Laclau, Mouffe, Wodak, Norris, Ostiguy
Wilayah yang dipelajari	Eropa, Amerika	Amerika Latin; Afrika, Asia	Global

Sumber: Benjamin Moffit (2020:26)

2. Tiga Kata Kunci Populisme

Meskipun para scholar mengajukan definisi yang berbeda-beda tentang populisme sebagaimana telah diuraikan secara singkat di atas, namun mereka secara tidak langsung sepakat bahwa populisme tidak terlepas dari tiga konsep kunci berikut, yaitu: rakyat, elite, dan kehendak umum (Heywood 2021:172; Mudde and Kaltwasser 2017:9).

Rakyat

Para populis selalu menggunakan kata rakyat (the people) dan mengatasnamakan rakyat dalam agenda dan retorika politiknya (de Vreese et al. 2018). Meskipun istilah rakyat sangat umum dan abstrak, namun istilah tersebut dikonstruksikan secara imajinatif dan politis dalam bentuk yang seolah-olah nyata mewakili semua pihak. Donald Trump misalnya, pada saat pidato pelantikannya sebagai presiden Amerika Serikat ke-45, di atas podium ia mengatakan:

“We are transferring power from Washington DC and giving it back to you, the people.”

Trump yang saat itu baru saja terpilih sebagai presiden Amerika Serikat memosisikan dirinya sebagai “pahlawan rakyat” sekaligus pemimpin yang berada di luar arena politik arus utama, sehingga begitu selesai dilantik sebagai presiden ia “menyerahkan” kekuasaan yang baru saja dimenangkannya kembali kepada “rakyat” Amerika. Seakan-akan rakyatlah yang memimpin Amerika meskipun pada kenyataannya Donald Trump-lah yang berkuasa. Narasi yang dibangun Trump seakan-akan sebelumnya kekuasaan Amerika berada di tangan

“orang lain”, “orang asing”, bukan rakyat Amerika yang sesungguhnya. Meski Trump tidak menyebut secara langsung siapa “orang lain” tersebut, publik dengan mudah menebak bahwa yang dimaksud Trump adalah Barack Husein Obama, Presiden Amerika Serikat pertama yang berasal dari keturunan kulit hitam. Trump secara implisit membangun narasi bahwa rakyat Amerika yang sesungguhnya adalah berkulit putih, sementara yang lain bukan murni rakyat Amerika, melainkan pendatang.

Narasi populis “the pure people” sebagaimana sering digunakan Trump dalam pidato politiknya juga digunakan oleh pemimpin populis di negara-negara berkembang atau negara maju seperti Inggris, Swedia, Denmark, Jerman, Perancis, Hongaria. Hal ini salah satunya disebabkan karena negara-negara tersebut telah dibanjiri oleh para pengungsi dan imigran yang datang dari negara-negara yang sedang dilanda konflik, seperti Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Kehadiran para imigran dalam pandangan para populis tidak hanya telah “menginvasi” negara mereka, mengancam identitas sosial dan budaya mereka, melainkan juga telah merebut pekerjaan mereka. Karena itu, pendukung populis di negara-negara Eropa dan Amerika berusaha memisahkan kembali antara imigran dengan penduduk setempat.

Elite

Kata kunci lain yang sering digunakan dalam konteks populisme adalah elite. Seperti halnya kata rakyat, elite juga merupakan kata yang dikonstruksi dan hasil imajinasi yang digambarkan bertolak belakang dengan rakyat. Jika rakyat digambarkan sebagai pemilik kekuasaan yang sebenarnya dan secara moral baik, bersih, dan tidak berdosa, sebaliknya elite oleh populis dicitrakan sebagai pihak yang merampas kekuasaan dari tangan rakyat. Mereka digambarkan berperilaku buruk, jahat, korup, dan hanya mementingkan kepentingan dirinya dan keluarganya (Jungkunz, Fahey, and Hino 2021; Mangset et al. 2019; Morisi and Wagner 2020).

Sama seperti istilah rakyat, istilah elite yang digunakan oleh para populis juga memiliki makna yang bias dan kabur. Sebagai contoh, Recep Tayyip Erdogan memosisikan dirinya sebagai rakyat, meski sebenarnya ia adalah elite

yang sudah berkuasa sejak tahun 2003 di Turki. Dalam satu kesempatan Erdogan berkata: “We are the people. Who are you?” Erdogan menyerang lawan politiknya dan menggambarkan mereka sebagai elite yang berusaha mengganggu pemerintahannya, yang menurutnya adalah “pemerintahan rakyat”. Hal yang sama juga dilakukan oleh Donald Trump di Amerika, Viktor Orban di Hongaria, Jair Bolsonaro di Brazil, Duterte di Filipina. Mereka memosisikan pihak oposisi sebagai elite, termasuk media arus utama yang sering mengkritik kebijakannya sebagai elite yang tidak berpihak kepada rakyat.

Tidak hanya itu, kaum populis juga menggambarkan elite sebagai pihak yang sedang berkuasa atau mendominasi sektor-sektor tertentu, termasuk ekonomi dan media. Mereka menyerang sekaligus menggambarkan media arus utama seperti CNN, Guardian, New York Times dengan “fake news”, lembaga penyelenggara pemilu “berperilaku curang”, pengadilan “musuh rakyat”, para intelektual sebagai “orang-orang liberal yang arogan”, konstitusi “sistem yang dirampas”, demonstrator sebagai “sekumpulan orang yang dibayar”, Uni Eropa “sekumpulan para birokrat dari Brussel”, PBB sebagai “klub yang hanya pandai bicara” (Norris dan Inglehart 2019:4). Penggambaran elite seperti ini biasanya dilakukan oleh aktor-aktor populis yang berada di luar partai politik arus utama atau pemerintahan yang sedang berkuasa.

Kehendak umum

Selain term rakyat dan elite seperti telah diuraikan di atas, para populis juga sering menggunakan istilah kehendak umum atau kehendak rakyat. Term ini digunakan untuk membedakan dengan kehendak elite atau kehendak politisi yang duduk di parlemen di mana mereka sering membuat keputusan yang menurut para populis hanya menguntungkan sebagian elite dan kelompok minoritas tertentu. Istilah kehendak rakyat juga merupakan cermin dari keinginan penyelenggaraan sistem demokrasi langsung dari pada demokrasi representatif. Dengan mekanisme demokrasi langsung maka kehendak rakyat atau kehendak mayoritas dinilai lebih murni. Namun mekanisme ini tidak selalu berjalan linear seperti yang diharapkan. Para pemimpin populis seringkali

mengambil keputusan sepihak dengan mengatasnamakan kehendak rakyat, padahal yang terjadi sebenarnya adalah kehendak personal pemimpin populis.

Pemimpin populis menilai dirinya berhak mewakili rakyat karena merasa telah mendapatkan mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum langsung. Model pemimpin seperti ini dalam pandangan Martin Wolf (2023) sebenarnya tidak berbeda dengan perilaku pemimpin autokrasi di mana ia ingin berkuasa sendiri, tidak ingin dikontrol oleh anggota parlemen sehingga terhindar dari proses *check and balance*. Lebih jauh menurut Martin Wolf (2023), skenario dan agenda yang dipendam oleh kebanyakan para pemimpin populis sebenarnya adalah menjadi pemimpin yang otoritarian, yang dapat mengambil keputusan kapan saja dan di mana saja dengan mengatasnamakan kehendak umum tanpa dihalangi oleh pihak lain. Karena itu, strategi yang digunakan oleh pemimpin populis biasanya adalah dengan menyerang bahkan memperlemah institusi-institusi yang memiliki fungsi mengontrol, seperti lembaga parlemen, pengadilan, organisasi masyarakat sipil, dan tentu saja media. Dengan menggunakan retorika rakyat versus elite, pemimpin populis menempatkan anggota parlemen, hakim, aktivis, intelektual, dan jurnalis sebagai bagian dari elite yang bertolak belakang dengan kehendak rakyat.

3. Ciri-Ciri Populisme

Norris dan Inglehart (2019:4) menggambarkan populisme seperti bunglon, warnanya berubah-ubah, menyesuaikan diri dengan tempat di mana ia berada, baik untuk memburu mangsa (pengikut) maupun untuk memproteksi diri dari ancaman bahaya (oposisi). Perumpamaan tersebut juga menunjukkan bahwa populisme memiliki varian yang beragam sesuai dengan tempat dan waktu. Seperti telah diuraikan secara singkat di atas, populisme di Eropa berbeda dengan di Amerika. Begitu pula populisme di Asia berbeda dengan di Afrika atau Amerika Latin. Masing-masing tempat memiliki karakteristik khas tersendiri, tentu saja sesuai dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi di negara tersebut dan bagaimana para pemimpin politik memanipulasinya dalam bentuk retorika populis. Berikut ini adalah beberapa karakteristik

populisme yang diidentifikasi berdasarkan fenomena populisme yang terjadi secara global.

Memosisikan dirinya di luar sistem yang mapan

Ciri pertama populisme adalah para pemimpinnya selalu memosisikan dirinya berada di luar sistem yang mapan (Wiles 1969:167), sebelum maupun pada saat berkuasa. Misalnya seorang pemimpin populis, pada saat maju sebagai calon presiden ia lebih memilih menggunakan relawan sebagai mesin politik (tim pemenangan) ketimbang menggunakan mesin partai politik. Strategi ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ia bukan bagian dari sistem yang mapan (seperti elite, parpol) meskipun pada dasarnya ia mencalonkan diri melalui partai politik. Dalam kasus yang lain, pemimpin populis lebih memilih mendirikan partai politik baru dan keluar dari partai politik lama yang mapan. Selain bertujuan lebih merepresentasikan pengikutnya, memiliki akses kontrol yang tidak terbatas terhadap partai yang ia pimpin, strategi ini juga bertujuan untuk membedakan partainya dengan partai-partai lain yang telah lebih dahulu berkuasa.

Membenci politik representatif

Ciri kedua populisme adalah anti terhadap politik representatif. Sikap ini sebenarnya bagian dari anti terhadap sistem (Mudde 2006:178-95). Dalam pandangan populis, politik representatif itu rumit, bertele-tele dan membuka ruang terhadap terjadinya praktik kolusi dan korupsi. Mereka memandang, partai politik dan lembaga parlemen yang menjadi elemen utama dalam politik representatif seringkali tidak mewakili kepentingan rakyat umum, melainkan hanya mewakili kepentingan dirinya, partai, dan kepentingan sebagian elite (Taggart 2000:2-3). Politik representatif menurut mereka juga cenderung menjadikan rakyat pasif dalam politik. Rakyat menjadi objek dan hanya dimanfaatkan pada saat-saat tertentu saja, seperti pada masa pemilihan umum. Selebihnya, rakyat dilupakan dan aspirasi rakyat tidak lagi didengar (Mudde and Kaltwasser 2017:17). Namun kebenciannya terhadap politik representatif tidak berarti mereka anti terhadap demokrasi. Menurut Mudde, populisme tidak menolak demokrasi, melainkan bagian dari demokrasi, bahkan menganggap

dirinya lebih demokrat dari yang lain. Berbeda dengan ekstremisme politik, seperti fasisme dan komunisme, populisme hanya anti terhadap demokrasi liberal dan anti terhadap institusi dan konstitusi yang menurut mereka membuat politik menjadi lebih kompleks (Mudde, 2006: 178-195). Karena itu pemimpin populis--terutama yang sedang berkuasa--cenderung mengabaikan lembaga parlemen dalam proses pengambilan kebijakan dan lebih memilih "berkonsultasi" langsung dengan pengikut setianya melalui media sosial atau dalam bentuk pertemuan langsung, lalu mengambil keputusan atas nama rakyat. Pengambilan keputusan dengan melibatkan lembaga representatif dinilai membutuhkan waktu lama, biaya yang besar, debat yang panjang dan dikhawatirkan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh "rakyat". Sementara pemimpin populis yang berada di luar kekuasaan cenderung mendorong pengambilan keputusan politik melalui mekanisme referendum di mana semua rakyat dapat terlibat langsung tanpa melalui perwakilan para politisi di parlemen.

Anti pluralitas

Ciri ketiga populisme, baik dalam praktik maupun dalam retorika adalah anti terhadap pluralitas. Berbeda dengan prinsip demokrasi liberal yang mengakui dan melindungi hak-hak kaum minoritas, bahkan mempromosikan multikulturalisme, populisme "tidak mengenal" adanya minoritas (Pelinka 2008:39-48). Bagi populis, rakyat adalah tunggal, tidak beragam. Tentu saja yang dimaksud rakyat di sini adalah rakyat mayoritas, baik berbasis etnis, ras, gender, dan agama yang dominan di negara tersebut. Di Amerika misalnya, dalam retorika populis, warga Amerika kulit putih adalah rakyat Amerika yang sesungguhnya, sementara warga minoritas seperti warga Amerika keturunan Afrika, Asia, Amerika Latin dianggap sebagai pendatang. Begitu pula di sebagian besar negara di Eropa Barat, para imigran yang datang ke Eropa karena berbagai alasan seperti karena mengungsi, mendapat suaka politik, bekerja, sekolah, atau menikah dengan warga setempat dianggap bukan warga negara mereka meskipun sudah menetap di sana puluhan tahun, telah memegang paspor negara tersebut, dan membayar pajak secara rutin. Fenomena yang sama

dalam konteks yang berbeda juga terjadi di negara-negara Asia di mana kelompok minoritas tidak diakui hak-haknya.

Tidak berbasis program, melainkan berbasis moral, teknik dan retorika.

Ciri keempat populisme adalah bahwa gerakan tersebut tidak berbasis pada program, melainkan lebih menekankan pada moral, teknik, dan retorika politik belaka (Pelinka 2008:39-48; De Waele 2008:49-55). Dalam retorika populis, mereka mengutuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para elite politik mapan sebelumnya, namun tidak ada formula solusi yang ditawarkan untuk mencegah agar praktik buruk tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Tidak jarang beberapa pemimpin populis yang sebelumnya mengkritik keras praktik KKN, disaat mereka berkuasa justru melakukan praktik yang sama, seperti mengangkat anak dan menantunya dalam lingkaran inti kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa moral hanya dipakai sebagai retorika politik belaka untuk memperoleh kekuasaan, bukan benar-benar sebagai program.

Populisme anti-intelektual

Ciri kelima dari populisme adalah anti terhadap intelektual (Wiles 1969:167), terutama intelektual liberal. Bagi para populis, intelektual adalah sekumpulan para liberal yang arogan (Norris dan Inglehart 2019:4). Basis penolakan mereka terhadap para intelektual didasarkan pada persepsi seperti: intelektual itu rumit, berbelit-belit, sukar dimengerti, dan prosedural, sementara populis cenderung menyederhanakan masalah dan menginginkan solusi yang instan dan cepat; intelektual cenderung berbasis pada rasionalitas, fakta dan diskursus, sementara populis bersandar pada irasionalitas dan moral; intelektual liberal umumnya membela kelompok minoritas, sementara populis memandang kelompok mayoritas lebih penting dan berhak mendapat perhatian ketimbang minoritas.

Sikap anti terhadap intelektual dan sains terlihat dengan jelas pada saat dunia dilanda pandemi Covid-19. Sebagian besar pemimpin populis menolak mengakui adanya Covid-19 (Harpen 2021:5). Dalam pandangan mereka, Covid-19 adalah hasil rekayasa intelektual dan saintis yang berkolaborasi dengan

negara tertentu untuk melemahkan ekonomi negara lain. Dalam konteks politik global, Cina dan Rusia seringkali dicurigai sebagai negara yang berusaha melemahkan negara lain, terutama Amerika dan negara-negara Eropa Barat. Sementara sebagian pemimpin populis lain menganggap Covid-19 sebagai flu biasa, bukan virus yang mematikan. Karena itu mereka cenderung meremehkan penanganan Covid-19 dan hanya menyarankan warganya untuk mengonsumsi obat flu biasa. Sebagian yang lain mengakui Covid-19 sebagai virus yang mematikan, namun pencegahannya tidak dilakukan secara serius. Demikian juga pada saat para saintis menemukan vaksin pencegahan Covid-19, reaksi pemimpin populis beragama, dari yang menolak divaksin hingga lebih memilih vaksin yang diproduksi oleh negara mereka sendiri. Penolakan terhadap vaksin disebabkan karena kecurigaan yang berlebihan, misalnya vaksin dicurigai mengandung alat yang mampu merekam data pribadi, mengandung unsur babi, berefek buruk terhadap tubuh, seperti mengakibatkan lumpuh dan lain sebagainya.

Populisme menguat pada saat krisis, muncul sebagai fenomena musiman

Ciri keenam populisme adalah kecenderungannya yang selalu menguat pada saat terjadi krisis ekonomi dan politik. Krisis merupakan momentum yang dinanti-nantikan oleh para populis untuk menjual gagasannya dan menaikkan popularitasnya. Dengan adanya krisis, populis dapat menyerang sistem mapan dan partai politik berkuasa. Misalnya saat resesi ekonomi 2008 yang melanda Dunia secara global, dukungan terhadap partai-partai populis terutama di Eropa Barat meningkat tajam. Para populis menggunakan momentum krisis ekonomi tersebut untuk menyudutkan sistem demokrasi dan ekonomi liberal sebagai dalang di balik krisis tersebut. Menurut mereka, sistem perdagangan bebas hanya menguntungkan negara kuat dan memperkaya segelintir elite, sementara masyarakat lokal yang tidak sanggup bersaing dengan pemodal besar menjadi terpojok. Pada saat yang bersamaan, para elite politik yang mengelola negara bersekongkol dengan para konglomerat, saling berbagi keuntungan untuk memperkaya diri sendiri, sementara rakyat ditinggalkan dan dilupakan.

Begitu pula saat krisis imigran tahun 2016 yang melanda sebagian besar Eropa Barat akibat konflik di Suriah, Irak, Libya, dan Afghanistan, para pemimpin populis menggunakan momentum tersebut untuk menyerang kebijakan pemerintah yang membuka akses dan memberi tempat kepada para imigran yang umumnya datang dari negara-negara konflik. Dalam pandangan populis, kehadiran para imigran telah membebani anggaran keuangan negara mereka. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan warganya justru digunakan untuk program integrasi sosial para pendatang. Fokus pemerintah yang terlalu besar kepada para imigran telah memunculkan gap dan kecemburuan sosial di kalangan warga yang merasa dirinya lebih layak dan berhak menerima layanan negara. Kondisi seperti itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para populis dalam mencari dukungan politiknya.

Populisme tampil seperti bunglon, selalu menyesuaikan dengan lingkungannya

Ciri ketujuh populisme adalah tidak memiliki nilai-nilai utama seperti halnya ideologi besar seperti liberalisme dan sosialisme. Karena itu ia bersandar pada ideologi lainnya dan selalu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat. Jika di negara tersebut dihuni oleh penduduk yang mayoritas agama tertentu maka ia akan bersandar pada nilai-nilai agama tersebut. Sebagai contoh, sebagian besar penduduk Eropa beragama Lutheran, maka pemimpin populis memanfaatkan nilai-nilai Lutheran sebagai strategi dan retorika politik populisnya. Begitu pula di India, pemimpin populis menggunakan sentimen Hindu yang dibenturkan dengan Islam dalam retorika politiknya. Seperti diketahui, 79,8 persen penduduk India beragama Hindu sehingga sangat mudah bagi pemimpin populis menggunakan sentimen agama untuk mengamankan kekuasaannya.

Para pemimpin populis juga sering disebut sebagai demagog karena pandai memanipulasi pendukungnya dengan retorika dan penampilan yang sesuai dengan tempat dan kondisi masyarakat setempat. Sebagai demagog, pemimpin populis berpura-pura menjadi sosok yang sangat religius dan dekat dengan kelompok agamawan meski sebelumnya ia dikenal sama sekali tidak taat

beragama, tidak memiliki latar belakang pendidikan agama, dan tidak pula berasal dari keluarga religius. Ada juga yang berpura-pura tampil sederhana, mengikuti pola hidup rakyat biasa, dekat dengan rakyat meski ia sebenarnya adalah miliuner yang kaya raya. Selain itu ada juga yang bersikap sangat dermawan. Misalnya pada saat bencana, ia berusaha menjadi orang pertama yang mengantarkan bantuan gawat darurat, lalu mengabadikan kegiatannya dalam bentuk video dan foto yang dipajang di berbagai media sehingga menunjukkan seolah-olah ia adalah seorang pemimpin yang sangat peduli dengan penderitaan rakyat. Ada juga pemimpin populis dalam retorika politiknya anti terhadap konglomerat asing namun di balik itu ia sendiri memiliki jaringan bisnis dengan para konglomerat asing, baik yang menjalankan bisnis di negaranya maupun di negara luar. Kadang kala untuk mengelabui para pendukungnya, pemimpin populis juga menggunakan atribut lain seperti barang-barang yang pernah digunakan oleh pemimpin karismatik sebelumnya sehingga imajinasi pendukung terbawa kembali ke masa lalu yang dianggap lebih jaya dan lebih makmur. Jadi dengan kata lain, pemimpin populis dalam usahanya mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan bersikap sangat adaptif dan pragmatis seperti bunglon

D. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa populisme merupakan sebuah fenomena global yang akhir-akhir ini menguat dan mendapat tempat dalam sistem politik demokratis. Fenomena ini terjadi di hampir semua negara, terutama negara-negara yang menganut sistem demokrasi liberal. Istilah populis dan populisme itu sendiri merupakan hasil konstruksi intelektual para scholar yang berusaha menjelaskan fenomena politik secara akademik. Meski para scholar tidak menemukan kata sepakat mengenai definisi konseptual populisme, apakah sebagai ideologi, gerakan, atau retorika dan diskursus politik, namun pada umumnya para scholar memiliki kesamaan pandangan di mana mereka melihat populisme sebagai antagonis berbasis moral yang membenturkan rakyat

yang murni, bersih, dengan elite yang korup, dan memandang kehendak umum harus lebih diutamakan dari pada kehendak elite.

Keberadaan populisme khususnya pada abad ke-20 dan 21 merupakan respons terhadap sistem demokrasi liberal. Demokrasi liberal dinilai telah menciptakan jarak antara elite dan rakyat mayoritas. Elit (politik, ekonomi, agama, intelektual, media, budayawan) sibuk dengan urusan sendiri dan melupakan rakyat. Elit juga dipandang korup dan lebih memberikan perhatian kepada kelompok minoritas (pendatang, atau minoritas berbasis agama, etnis, ras, gender) yang jumlahnya lebih kecil dibanding mayoritas penduduk setempat. Fakta bahwa elite (terutama politik dan ekonomi) korup memang tidak dapat dibantah, khususnya mereka yang menduduki posisi strategis di lembaga penopang demokrasi liberal, seperti partai politik, parlemen, bahkan lembaga regional seperti Uni Eropa. Praktik korupsi yang melibatkan elite partai sangat masif diberitakan media massa maupun media sosial. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat umum menjadi putus asa dan frustrasi, sebab pada saat yang bersamaan kehidupan sosial dan ekonomi mereka juga tidak banyak berubah bahkan mengalami regresi dan stagnasi. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin populis dengan menjanjikan perubahan kepada rakyat yang tertindas dan teralienasi jika ia dipilih sebagai pemimpin baru. Dengan kata lain, menguatnya populisme dalam berbagai skenario dan tempat tidak terlepas dari adanya permintaan (rakyat yang merasa teralienasi dan membutuhkan perubahan dan jalan keluar) dan penawaran (pemimpin populis yang mengharapkan kekuasaan). Ketika dua senyawa ini bertemu, maka terbentuklah populisme.

Daftar Pustaka

- Corbett, Steve. 2016. "The Social Consequences of Brexit for the UK and Europe: Euroscepticism, Populism, Nationalism, and Societal Division." *The International Journal of Social Quality* 6(1). doi: 10.3167/IJSQ.2016.060102.
- Freedland, Jonathan. 2023. "After Brexit and Trump, Rightwing Populists Cling to Power – but the Truth Is They Can't Govern." *The Guardian*. Retrieved March 24, 2023 (<https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/06/brexit-trump-populists-power-us-republicans-tory-party>).
- Goodhart, David. 2017. *The Road to Somewhere: The Populist Revolt and The Future of Politics*. London: Hurst & Company.
- Hadiz, Vedi. R. 2016. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Harpen, Marcel H. Van. 2021. *The End of Populism: Twenty Proposals to Defend Liberal Democracy*. Manchester University Press.
- Heywood, Andrew. 2021. *Political Ideologies: An Introduction*. London: Red Globe Press.
- Holliday, Adrian. 2007. *Doing and Writing Qualitative Research*. Los Angeles: SAGE Publications Ltd.
- Inglehart, Ronald, and Pippa Norris. 2016. "Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash." *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.2818659.
- Ionescu, Ghita, and Ernest Gellner. 1969. *Populism: Its Meanings and National Characteristics*. London: Weidenfeld and Nicolson.
- Jansen, Robert S. 2011. "Populist Mobilization: A New Theoretical Approach to Populism." *Sociological Theory* 29(2):75-96. doi: 10.1111/j.1467-9558.2011.01388.x.
- Jonge, Léonie de. 2017. "First Brexit and Now Trump: What Is Populism and How Might We View It?" *University of Cambridge*. Retrieved March 24, 2023 (<https://www.cam.ac.uk/research/discussion/first-brexit-and-now-trump-what-is-populism-and-how-might-we-view-it>).
- Jungkunz, Sebastian, Robert A. Fahey, and Airo Hino. 2021. "How Populist Attitudes Scales Fail to Capture Support for Populists in Power" edited by J.-F. Daoust. *PLOS ONE* 16(12):e0261658. doi: 10.1371/journal.pone.0261658.
- Kaletsky, A. 2016. "Trump's Rise and Brexit Vote Are More an Outcome of Culture than Economics." *The Guardian*, np.
- Langlois, Laëtitia. 2021. "The Brexit Vote and The Trump Vote: A Comparative Study of the Common Trends and Factors That Led to a Populist Radical Right Vote in Britain and the United States." *Revue LISA / LISA e-Journal* (vol.

- 19-n°51). doi: 10.4000/lisa.13054.
- Mangset, Marte, Fredrik Engelstad, Mari Teigen, and Trygve Gulbrandsen. 2019. "The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques." *Comparative Social Research* 34:203–22. doi: 10.1108/S0195-631020190000034010/FULL/EPUB.
- Michael Cox. 2017. "The Rise of Populism and the Crisis of Globalisation: Brexit, Trump and Beyond." *Irish Studies in International Affairs* 28:9. doi: 10.3318/isia.2017.28.12.
- Mietzner, Marcus. 2020. "Rival Populisms and the Democratic Crisis in Indonesia: Chauvinists, Islamists and Technocrats." *Australian Journal of International Affairs* 74(4):420–38. doi: 10.1080/10357718.2020.1725426.
- Moffit, Benjamin. 2020. *Populism*. Cambridge: Polity Press.
- Morisi, Davide, and Markus Wagner. 2020. "Bringing People Closer to the Elites: The Effect of Information on Populist Attitudes." *International Journal of Public Opinion Research*. doi: 10.1093/ijpor/edaa033.
- Mudde, Cas. 2004. "The Populist Zeitgeist." *Government and Opposition* 39(4):541–63. doi: 10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x.
- Mudde, Cas. 2006. "Anti-System Politics." in *Developments in European Politics*, edited by P. M. Heywood, E. Jones, M. Rhodes, and U. Sedelmeier. London: Palgrave Macmillan.
- Mudde, Cas. 2007. *Populist Radical Right Parties in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mudde, Cas, and Cristobal Rovira Kaltwasser. 2017. *Populism A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Norris, Pippa, and Ronald Inglehart. 2019. *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Pelinka, Anton. 2008. "The Rise of Populism." in *Democracy, Populism and Minority Rights*, edited by H. Swoboda and J. M. Wiersma. Renner Institute.
- Shuster, Simon. 2016. "Populism: The Rise of This Political Trend in Europe." *Time - Person of the Year* 1–3.
- Taggart, Paul. 2000. *Populism*. Philadelphia: Open University Press.
- de Vreese, Claes H., Frank Esser, Toril Aalberg, Carsten Reinemann, and James Stanyer. 2018. "Populism as an Expression of Political Communication Content and Style: A New Perspective." *The International Journal of Press/Politics* 23(4):423–38. doi: 10.1177/1940161218790035.
- De Waele, Jean-Michel. 2008. "Faces of Populism in Central and Eastern Europe." in *Democracy, populism and minority rights*, edited by H. Swoboda and J. M. Wiersma. Renner Institute.
- Weyland, Kurt. 2001. "Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of

- Latin American Politics." *Comparative Politics* 34(1):1. doi: 10.2307/422412.
- Wiles, Peter. 1969. "A Syndrome, Not A Doctrine: Some Elementary Thesis On Populism." Pp. 166-79 in *Populism Its meanings and National Characteristics*, edited by G. Ionescu and E. Gellner. London: The Garden City Press Limited.
- Wodak, Ruth. 2015. *The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean*. London: Sage Publication Ltd.
- Wolf, Martin. 2023. *The Crisis of Democratic Capitalism*. UK: ALLEN LANE.